

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan upaya berkelanjutan dan progresif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan holistik penduduk, menangani dimensi material dan spiritual (Waluyo, 2017). Tujuan pembangunan mencakup serangkaian aspek kehidupan yang komprehensif, termasuk dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Untuk mewujudkan tujuan ini, negara perlu mengeksplorasi sumber daya keuangan domestik, terutama melalui pengenaan pajak. Pendapatan yang dihasilkan dari perpajakan kemudian diinvestasikan kembali untuk membiayai inisiatif pembangunan yang menguntungkan masyarakat pada umumnya.

Pajak merupakan kontribusi keuangan wajib yang dikenakan oleh negara pada individu atau entitas, ditandai dengan kerangka hukum koersif, tanpa kompensasi langsung, dan dialokasikan untuk tujuan regional yang bertujuan memaksimalkan kemakmuran warga negara (Mardiasmo, 2018). Sistem perpajakan secara inheren dinamis dan mudah beradaptasi, mencerminkan sifat lanskap sosial ekonomi negara yang berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk kerangka keuangan negara. Selain itu, mereka secara signifikan meningkatkan keuangan negara, terutama dalam konteks inisiatif pembangunan nasional.

Dalam upaya memajukan daerah guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan pendapatan atau penerimaan daerahnya. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong perubahan

dan terselenggaranya pembangunan daerah yang adil dan merata. Upaya ini mendapat ruang yang luas dalam kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam dan melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberi mandat dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri roda pemerintahan dan kebutuhan daerahnya. Pada dasarnya, penerapan otonomi daerah diikuti dengan kebijakan lain yang disebut kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah demi mendukung tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Saraghi, 2003). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi itu berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suwandi, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lainya penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainya pendapatan asli daerah yang sah. Upaya mencapai pembangunan nasional yang diharapkan, maka diperlukan pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan yang cukup berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

Berdasarkan klasifikasinya, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Supramono, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Jenis Pajak, dijelaskan bahwa pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara pajakkabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendorong setiap daerah untuk berlomba-lomba dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Sektor ini sangat berguna dalam menunjang penerimaan daerah demi mendukung pendapatan asli daerah tersebut.

Salah satu Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah dari rakyat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Masyarakat luas khususnya yang terlibat dalam dunia kerja membutuhkan kendaraan bermotor agar mobilisasi dapat berjalan cepat dan efektif, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Di Indonesia, perkembangan jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat semakin bertambah dari tahun ketahun. Fenomena yang sama juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sebagaimana telah diterangkan sebelumnya jelas berpengaruh langsung pada bertambahnya jumlah subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT). Subyek dan objek pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya berpengaruh pada pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Peningkatan subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor di NTT menyisakan ironi tersendiri. Hal ini disebabkan, masih ada subyek Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dimilikinya dengan berbagai alasan.

Sejak awal tahun 2020, penyakit pandemi baru yang disebut COVID-19 telah muncul (Paramitha, 2021). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Coronavirus (COVID) memiliki kemampuan untuk menginfeksi sistem pernapasan manusia (Arianto, 2021). Dalam keadaan yang berlaku, virus corona merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dengan sepele. Dari perspektif gejala, masyarakat umum mungkin menganggapnya hanya mirip dengan influenza biasa; Namun, dari sudut pandang medis, virus ini sangat berbahaya dan mematikan. Perkembangan penularan yang terkait dengan virus ini sangat jelas, mengingat penyebarannya secara global, dengan semua negara, termasuk Indonesia, mengalami konsekuensinya (Sumarni, 2020).

Proliferasi COVID-19 yang cepat mendorong banyak negara di seluruh dunia untuk menegakkan langkah-langkah lockdown, termasuk Indonesia, yang melembagakan pembatasan sosial yang ekstensif untuk jangka waktu yang lama. Situasi ini jelas telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada keadaan ekonomi individu. Sepanjang pandemi COVID-19, banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasi karena larangan pertemuan dan perjalanan yang tidak penting. Akibatnya, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan

mereka, yang mengakibatkan tantangan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), data menunjukkan bahwa selama empat tahun sebelumnya, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTT terus meningkat. Di bawah ini adalah data empiris yang mencerminkan kondisi aktual mengenai pendaftaran kendaraan bermotor dan kepatuhan pajak di Provinsi NTT dari tahun 2016 hingga 2019, khususnya.

Tabel 1.1
Potensi Dan Realisasi Kendaraan Bermotor
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2016 – 2019

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak
2016	621.172	290.026
2017	679.828	303.808
2018	738.814	334.811
2019	800.443	364.286
2020	844.842	344.914

Sumber :Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Data pada tabel 1.1 menunjukan bahwa hampir setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Namun, setiap tahun hampir setengah dari jumlah kendaraan yang terdaftar tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan bermotor. Pada tahun 2016-2020 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 merupakan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelum terjadinya covid 19 banyak kendaraan bermotor yang terdaftar tidak membayar pajak. Dengan terjadinya wabah corona yang menyerang dunia

termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin banyak pula yang tidak membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang menurun. Menurunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor (Badan Pendapatan dan aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur). Wajib pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak daerahnya, akibat merebaknya pandemi virus corona,” (Nora, 2020).

Berdasarkan sejumlah alasan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian, dengan judul: **DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah dampak pandemi COVID-19 pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimakah strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemic COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor serta dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi penulis

Upaya penelitian ini diharapkan menjadi instrumen berharga dalam penerapan keahlian penulis mengenai perpajakan kendaraan bermotor dan konsekuensi pandemi COVID-19 terhadap pendapatan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kerangka teoritis tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam konteks pandemi COVID-19, sehingga menguntungkan pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor bagi individu yang bercita-cita untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut dalam domain ini.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga dapat menjadi titik acuan bagi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam upaya menaikkan pendapatan khususnya yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor.